

STRATEGI PENGELOLAAN PERTANIAN SALAK DI KECAMATAN BANJARNEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

Oleh :

Meitasari Setyaningsih, Endang Larasati, Aloysius Rengga, Margareta Suryaningsih

Jurusan Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon

(024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Salah satu fungsi pengelolaan adalah fungsi *actuating* (penggerakan). Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi *actuating* sering disebut dengan bermacam-macam nama, antara lain *leading*, *directing*, *motivating*, atau lainnya.

Pertanian salak merupakan sumber mata pencaharian utama di Banjarnegara, namun hal ini belum ada strategi pengelolaan pertanian salak yang maksimal untuk menambah pendapatan masyarakat. Kurangnya pegawai penyuluh pertanian menjadikan kurang efektif pemerintah dalam melaksanakan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian yang ada, karena setiap penyuluh dapat membawahi lebih dari lima kelompok pertanian yang ada di Kecamatan Banjarnegara. Selain itu, kurangnya antusias masyarakat menjadi penghambat dalam pengelolaan pertanian salak di Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.

Dengan adanya UU 23 Tahun 2014 yang mengharuskan bahwa setiap kelompok pertanian mempunyai badan hukum untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah menjadikan suatu alasan bagi kelompok untuk tidak mau membuat badan hukum tersebut karena membutuhkan biaya yang cukup besar dan terkadang bantuan yang didapatkan tidak sebanding dengan apa yang ia keluarkan sehingga kelompok enggan untuk membuat badan hukum tersebut.

Keywords : Strategi Pengelolaan Pertanian Salak Kecamatan Banjarnegara

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara etimologis “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Biro Pusat Statistik, mendefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kemiskinan sosial adalah kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat sehingga mencegah dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan kesempatan – kesempatan yang tersedia. Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian negara. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima seseorang. Namun demikian, secara luas kemiskinan juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan yaitu berupa kekurangan pendidikan, kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena itu, kemiskinan

hanya dapat ditanggulangi apabila dimensi-dimensi lain itu diperhitungkan. Kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (sandang, pangan, dan papan); (2) ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, dan transportasi); (3) ketiadaan jaminan masa depan karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga; (4) kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun masal; (5) rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber daya alam; (6) ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat; (7) ketiadaan akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkesinambungan; (8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; dan (9) ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial. (Suharto, 2009:132). Kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara merupakan permasalahan yang sulit untuk diatasi, salah satunya adalah kemiskinan yang terjadi di Kecamatan Banjarnegara khususnya pada sektor masyarakat pertanian. Kecamatan Banjarnegara terdiri dari 4 Desa dan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 26.24 Kilometer persegi. Kondisi wilayahnya terdiri atas dataran yang meliputi 4 Desa

yaitu Desa Ampelsari, Desa Tlagawera, Desa Cendana dan Desa Sokayasa sedangkan 9 Kelurahan lainnya merupakan daerah aliran sungai. Luas lahan yang terdapat di Kecamatan Banjarnegara terdiri dari luas lahan sawah 793,694 Ha, luas pekarangan dan bangunan 813,484 Ha, luas kebun 810,166 Ha, luas kolam 31,190 Ha. Kecamatan Banjarnegara memiliki lahan sumber daya yang melimpah namun masyarakat tidak dapat mengelola sumber daya tersebut menjadi suatu penghasilan sehingga kemiskinan masih menjadi kendala bagi masyarakat di Kecamatan Banjarnegara khususnya terhadap masyarakat yang berada di pedesaan dalam sektor pertanian. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan mengakibatkan tidak berkembangnya pembangunan di daerah tersebut. Pemerintah kurang memberdayakan masyarakat daerah untuk mengolah potensi-potensi sumber daya alam yang dimiliki seperti pertanian. Pertanian di Kecamatan Banjarnegara merupakan salah satu potensi yang dapat diunggulkan untuk menambah pendapatan masyarakat. Di Kecamatan Banjarnegara terdapat beberapa lahan pertanian antara lain adalah Aren, Cengkeh, Kakao, Kapulaga, Kelapa, Kopi, Lada, Pala, Jahe, Kencur, Kunyit, Laos, Salak dan Padi. Pertanian yang ada di daerah sekitar belum

dapat diolah secara maksimal, masyarakat hanya menjual dengan barang masih mentah setelah dipanen belum menjadi olahan yang seharusnya dapat menjadikan nilai lebih terhadap produksi tersebut. Komoditas pertanian di Kecamatan Banjarnegara yang tertinggi atau potensi yang sangat banyak hasilnya adalah salak, namun masyarakat belum dapat mengelola hasil pertanian salak tersebut dengan maksimal sehingga belum dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat pada table data pertanian Kecamatan Banjarnegara sebagai berikut

Jumlah Data Hasil Pertanian di Kecamatan Banjarnegara Tahun 2014

No	Jenis Tanaman Dan Luas (Ha)	Hasil Panen	Jumlah Dalam %
1	Salak (155 Ha)	4464 Ton	55,90
2	Padi (492 Ha)	2772 Ton	34,71
3	Jagung (117 Ha)	644 Ton	8,06
4	Ubi Kayu (272 Ha)	93 Ton	1,16
5	Ubi Jalar (6 Ha)	12 Ton	0,15
6	Jumlah	7985 Ton	100%

Sumber Data: BIPP Kec. Banjarnegara

Berdasarkan tabel diatas tentang informasi mengenai hasil pertanian dapat diketahui bahwa potensi hasil pertanian di

Kecamatan Banjarnegara adalah dari hasil pertanian salak. Dengan demikian salak merupakan unggulan pertanian di Banjarnegara yang dapat dikembangkan sebagai olahan untuk menambah pendapatan masyarakat Banjarnegara, namun terdapat beberapa kendala untuk mengelola hasil pertanian yang ada di Banjarnegara tersebut.

Kendala yang dialami masyarakat Kecamatan Banjarnegara dalam pengembangan potensi pertanian yang ada di daerahnya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih kurang memahami cara pengolahan hasil pertanian tersebut serta sarana prasarana yang kurang memadai. Di Kecamatan Banjarnegara belum ada program pemberdayaan masyarakat dari pemerintah, pemerintah hanya memberikan bantuan langsung masyarakat yang diberi nama PNPM Mandiri. Dalam kenyataannya program pemerintah belum memberdayakan masyarakat dan hanya sekedar memberikan bantuan modal tanpa melakukan pemberdayaan masyarakat pada implementasinya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengenai Strategi Pengelolaan Pertanian Salak di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendiskripsikan kendala apa yang dihadapi dalam melakukan pengelolaan pertanian salak di Kecamatan Banjarnegara.
2. Untuk mendiskripsikan strategi apa yang dilakukan dalam pengelolaan pertanian salak Kecamatan Banjarnegara.

C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah administrasi publik, pengelolaan, manajemen strategi dan perencanaan strategis.

Prajudi Atmosudirjo dan Arifin Abdulrachman mendefinisikan administrasi publik (dalam Syafiie, 2006:24), menurut Prajudi Atmosudirjo administrasi public adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuan-tujuan yang bersifat kenegaraan, sedangkan Arifin Abdulrachman mendefinisikan Administrasi Publik adalah ilmu yang mempelajari pelaksanaan dari politik negara. Lain halnya dengan Dwight Waldo yang mengartikan Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah (dalam Syafiie, 2006:25).

Chandler dan Plano dalam (Hakim, 2011:20) menyatakan bahwa administrasi publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

Salah satu fungsi pengelolaan adalah fungsi *actuating* (penggerakan). Fungsi ini melibatkan kualitas, gaya, dan kekuasaan pemimpin serta kegiatan-kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi *actuating* sering disebut dengan bermacam-macam nama, antara lain *leading*, *directing*, *motivating*, atau lainnya.

Menerima pendapat yang mengatakan bahwa manusia merupakan unsure terpenting dari seluruh unsure administrasi dan manajemen berarti mengakui pula bahwa fungsi penggerakan merupakan fungsi manajerial yang teramat penting karena langsung berkaitan dengan manusia, segala jenis kepentingan, dan kebutuhannya. Tujuan organisasi yang telah ditetapkan untuk dicapai pada akhirnya haruslah dalam rangka

peningkatan mutu hidup manusia sebagai insane politik, insane ekonomi, makhluk sosial, dan sebagai individu. Tepat tidaknya strategi dasar yang telah ditetapkan sebagai petunjuk arah yang hendak ditempuh oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan itu hanya ada maknanya apabila diterima dan dilakukan oleh manusia (Saigan, 2005: 95).

Penggerakan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin dengan tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan ekonomis.

Henry Fayol, menggunakan istilah *commanding* untuk penggerakan. Menurut beliau cara terbaik untuk menggerakan para anggota organisasi adalah dengan pemberian komando dan tanggung jawab utama para bawahan terletak pada pelaksanaan pemerintah yang telah diberikan.

Selanjutnya Luther Gullick menggunakan istilah *directing* yang dimaksudkan untuk menggerakan para bawahan. *Directing* adalah suatu tugas yang kontinu dalam pembuatan keputusan dan penyusunannya dalam aturan-aturan dan instruksi-instruksi khusus atau umum, dan

melayani sebagai pemimpin organisasi. *Directing* juga mempunyai makna pemberian petunjuk dan penentuan arah yang harus ditempuh oleh para pelaksana kegiatan operasional. Di dalam kehidupan organisasional *directing* berarti bahwa dikalangan para manajer terdapat persepsi bahwa para bawahan adalah orang-orang yang tingkat kematangannya, dalam arti teknis dan psikologis perlu dibimbing, dituntun, dan diarahkan. Manajemen merupakan salah satu yang terdapat pada disiplin ilmu administrasi publik. Kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh organisasi non-profit menyebabkan pemanfaatan teori-teori strategi dalam pengendalian organisasi tidak dihindari lagi. Korten (dalam Salusu, 2005 : 39) menyatakan bahwa pemerintah dan organisasi non-profit dalam membuat keputusan-keputusan penting haruslah efektif secara strategi. Perencanaan strategi dapat membantu pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, organisasi-organisasi dan badan-badan pemerintah lainnya untuk menangani perubahan yang mengagetkan seperti yang dialami banyak Negara pada tahun-tahun belakangan ini (Bryson, 1999 : 55).

Berbagai teori dikemukakan oleh tokoh-tokoh yang ikut serta dalam disiplin ilmu manajemen maupun administrasi publik.

Marry Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai berikut : “Manajemen sebagai suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain“. (Damai Darmadi, 2009 : 239).

Sondang P. Siagian mengemukakan manajemen sebagai berikut : “Kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu dalam rangka pencapaian tujuan melalui usaha atau kegiatan orang lain“. (Damai Darmadi, 2009 : 239)

G. R. Terry mendefinisikan manajemen yaitu : “Manajemen merupakan pencapaian sasaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain“. (Damai Darmadi, 2009 : 240).

Perencanaan strategis adalah instrumen kepemimpinan dan suatu proses. Sebagai suatu proses, perencanaan strategis menentukan apa yang dikehendaki suatu organisasi di masa depan dan bagaimana usaha mencapainya; suatu proses yang menjelaskan sasaran-sasaran. Seperti juga ditegaskan oleh Steiss (Salusu, 2008:500) bahwa perencanaan strategis sebagai

komponen dari manajemen strategis bertugas untuk memperjelas tujuan dan sasaran, memilih berbagai kebijaksanaan, terutama dalam memperoleh dan mengalokasikan sumber daya, serta menciptakan suatu pedoman dalam menerjemahkan kebijaksanaan organisasi.

Perencanaan strategis adalah suatu cara untuk mengurangi resiko, suatu instrumen untuk mendidik para manajer, para pejabat inti, pejabat menengah, dan kepala-kepala unit kerja. Perencanaan strategis dapat juga diartikan sebagai suatu metode dalam mengarahkan para pemimpin unit kerja sehingga keputusan-keputusan dan tindakan mereka mempunyai dampak terhadap masa depan organisasi dengan cara yang konsisten dan rasional.

Perencanaan strategis bahkan dipandang sebagai metode untuk mengelola perubahan-perubahan yang tidak dapat dihindari sehingga dapat juga disebut sebagai metode untuk berurusan dengan kompleksitas lingkungan yang seringkali erat hubungannya dengan kepentingan organisasi. Selain itu

merupakan suatu metode untuk menangani kompleksitas lingkungan internal yang ditimbulkan oleh bermacam-macam kebutuhan dari tiap unit kerja dalam organisasi.

Perencanaan strategis merupakan proses yang mengarahkan para pemimpin mengembangkan visi dalam menggambarkan masa depan yang dikehendaki; mengubah cara manajemen berpikir, mengalokasikan, dan merealokasikan berbagai sumber daya, sementara pelaksanaan program berlangsung; serta mencakup pilihan-pilihan yang berkaitan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Bahkan perencanaan strategis adalah falsalah, yaitu suatu sikap, *a way of life*, suatu proses berpikir, suatu aktivitas intelektual (Steiner, 1979).

Mercer (dalam J. Salusu, 2008) menawarkan enam elemen kunci dalam suatu perencanaan strategis yang efektif, yaitu sebagai berikut:

1. Scanning lingkungan yang mencakup analisis SWOT,
2. Pernyataan tentang misi organisasi
3. Seperangkat strategi yang menegaskan apa yang harus dilakukan untuk mencapai misi itu
4. Sasaran dari setiap strategi

5. Taktik atau rencana operasional jangka pendek untuk merealisasikan sasaran tadi

Kontrol, yaitu pengendalian dalam langkah-langkah evaluasi yang menentukan sebaik mana rencana strategis itu dijalankan

D. Fenomena Penelitian

Untuk mengetahui kondisi nyata peneliti menggunakan model perencanaan strategi dari Bryson, fenomena yang akan diamati adalah :

1. Tujuan dan sasaran

Strategi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara serta penyuluh pertanian berkaitan erat dengan tujuan dan saran seperti :

- a. Mensosialisasikan strategi penyuluh pertanian
- b. Tercapainya target yang telah dibuat oleh penyuluh pertanian
- c. Berkurangnya angka kemiskinan di Kecamatan Banjarnegara

2. Lingkungan

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (DINTANKANNAK) dan penyuluh pertanian harus dapat mengeksplorasi lingkungan diluar organisasi untuk mengidentifikasi

peluang bagi petani di Kecamatan Banjarnegara dan ancaman yang dihadapi oleh organisasi seperti :

- a. Faktor ekonomi, sosial-budaya masyarakat dan politik
- b. Sumber Daya Manusia
- c. Kultur organisasi
- d. Beberapa permasalahan dari lingkungan luar
- e. Merespon lingkungan eksternal
- f. Beberapa permasalahan internal
- g. Merespon permasalahan internal

3. Penerapan Strategi

Untuk menjalankan strategi yang telah dibuat oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (DINTANKANNAK) dalam penanganan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian seperti :

- a. Penciptaan struktur organisasi yang efektif
- b. Penyiapan anggaran
- c. Penan sistem infgembangan dan pemanfaatan informasi

4. Pernyataan Visi dan Misi

Perencanaan berskala besar yang berorientasi pada jangkauan masa depan dan ditetapkan sebagai keputusan manajemen puncak agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif menghasilkan sesuatu seperti :

- a. Menciptakan visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan
- b. Indikator keberhasilan kunci dari visi dan misi organisasi
- c. Mensosialisasikan visi dan misi organisasi
- d. Organisasi merespon keinginan stakeholder
- e. Filosofi yang terkandung dalam visi organisasi
- f. Filosofi yang terdapat dalam misi organisasi

E. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yang akan digunakan yaitu metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dalam hal ini peneliti akan mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan judul yang diambil. Tempat atau wilayah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah di Kecamatan Banjarnegara, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (DINTANKANNAK) dan di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Banjarnegara (BPP) Kecamatan Banjarnegara, dimana tempat peneliti ini akan dilakukan karena sumber daya manusia di Kecamatan Banjarnegara, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Peternakan (DINTANKANNAK) dan Penyuluh

Pertanian Kecamatan Banjarnegara sudah mencukupi kuantitas maupun kualitasnya dalam pemberdayaan masyarakat Kecamatan Banjarnegara dibidang pertanian tersebut.

Dalam penelitian ini, penetapan subyek peneliti berdasarkan pihak utama yang terkait yaitu masyarakat pertanian Kecamatan Banjarnegara, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan (DINTANKANNAK) Kabupaten Banjarnegara dan penyuluh pertanian Kecamatan Banjarnegara yang dapat menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian Kecamatan Banjarnegara.

PEMBAHASAN

4.1. A. Kendala atau Hambatan yang dihadapi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara

Selama ini di dalam upaya strategi dinas telah ditemui beberapa kendala atau hambatan, dalam mengetahui kendala atau hambatan yang telah di buat oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara dalam mencapai sasaran untuk menangani pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian itu, kendala atau hambatan dapat dilihat dari beberapa pertanyaan yang telah dilakukan oleh peneliti. Faktor utama dari kendala atau

penghambat strategi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakkan Kabupaten Banjarnegara tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diinginkan, karena sumber daya atau pegawai di dinas itu sendiri masih kurang dan belum ada inovasi untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian yang ada di Banjarnegara. Selain pegawai yang ada di dintankannak, pegawai penyuluh pertanian di Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Banjarnegara juga masih sangat minim sehingga tidak dapat lebih fokus untuk memberikan penyuluhan dalam membuat pengolahan hasil pertanian di daerah tersebut. Penyuluh pertanian hanya memberikan penyuluhan sebatas apa ilmu yang ia miliki belum sampai ke pengolahan hasil pertanian. Pelatiha-pelatihan yang diberikan oleh dinas kepada masyarakat juga masih kurang diperhatikan, sehingga tidak merubah pola pikir masyarakat untuk mengembangkan hasil pertanian yang dimiliki dengan mengolah agar dapat nilai jual yang tinggi dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Faktor inilah yang menyebabkan angka kemiskinan di Banjarnegara masih tetap dan tidak berkurang.

B. Tahapan selanjutnya yang perlu dibahas pada pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian adalah

mengetahui lingkungan strategis. Lingkungan strategis terdiri dari lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal yang mempengaruhi perumusan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian. Menilai lingkungan internal dan eksternal organisasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin akan dihadapi dalam pelaksanaan tersebut.

1. Kesesuaian Visi dan Misi dengan Kondisi

Kesesuaian visi dan misi dengan kondisi, tantangan dan kebutuhan saat ini sangat mempengaruhi dalam perumusan dan pelaksanaan strategi. Apabila visi dan misi sesuai maka akan mendukung dalam perumusan dan pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Banjarnegara. Visi dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakkan Kabupaten Banjarnegara yaitu “terwujudnya pertanian yang tangguh dan mandiri yang berorientasi agribisnis dan berwawasan lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat Banjarnegara”. Visi diatas yang dimaksudkan dalam lingkup pemberdayaan pengolahan hasil pertanian itu artinya membuat masyarakat Banjarnegaran menjadi sejahtera dalam

segi pertanian, perekonomian yang mandiri agar dapat bersaing dengan kota atau kabupaten lainnya. Sehingga dapat menjadikan kabupaten Banjarnegara menjadi lebih maju dan terbebas dari kemiskinan.

2. Pelaksanaan Misi guna pencapaian visi

Visi menurut Helgeson (dalam Salusu, 2005) adalah menjelaskan bagaimana rupa yang seharusnya dari suatu organisasi kalau ia berjalan dengan baik. Visi keberhasilan dapat dijelaskan sebagai suatu deskripsi tentang bagaimana seharusnya rupa seni dari suatu organisasi pada saat ia berhasil dengan sukses melaksanakan strateginya dan menemukan dirinya yang penuh potensi yang mengagumkan. Misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani nilai-nilai dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita dimasa depan. Pelaksanaan misi yang tepat akan mempermudah pencapaian visi. Pelaksanaan misi merupakan penciptaan program kerja maupun kegiatan. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakkan Kabupaten Banjarnegara telah berupaya

melaksanakan misinya, sehingga diharapkan dengan adanya komitmen dan langkah konkrit untuk melaksanakan misi tersebut akan mendorong keberhasilan program.

3. Kualitas Sumber Daya Manusi (SDM) yang memadai

Sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam setiap pelaksanaan program. Sumber daya manusia yang berperan dalam perencanaan dan pelaksanaan berbagai program. Kualitas sumber daya manusia pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakkan Kabupaten Banjarnegara sudah memadai dalam hal kualitas.

4. Anggaran Dinas

Anggaran dinas adalah hal yang penting dalam menjalankan program yang telah dibuat, agar suatu program yang telah dibuat dapat sesuai rencana maka perlu adanya dukungan dari anggaran, dengan adanya anggaran yang mencukupi maka semua dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan.

Tadi kita telah melihat segi dari kekuatan (*strength*) sekarang kita melihat dari segi kelemahan (*weakness*), kelemahan (*weakness*) Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakkan Kabupaten Banjarnegara

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam strategi Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara menemukan beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi pada pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian, kendala atau hambatan yang dihadapi adalah kurangnya SDM di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Banjarnegara. Dengan terbatasnya SDM yang dimiliki menjadi kendala dalam pencapaian strategi yang maksimal.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka untuk merumuskan strategi yang telah dibuat oleh Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banjarnegara. Berikut hasil identifikasi isu-isu strategi dalam pengupayaan strategi:
 - a. Strategi S-O
 1. Peningkatan peran serta stakeholder
 2. Pengoptimalan anggaran dengan kerjasama pihak swasta
 - b. Strategi S-T
 1. Peningkatan koordinasi dengan pihak stakeholder untuk melakukan pelatihan dan pembinaan lebih baik
 2. Peran serta masyarakat untuk meningkatkan produk pertanian dengan hasil olahan yang menarik agar dapat dipasarkan melalui web atau blog
 - c. Strategi W-O
 1. Peningkatan Kuantitas SDM di dinas maupun di balai penyuluh pertanian
 - d. Strategi W-T
 1. Meningkatkan kualitas SDM untuk mengetahui tentang teknologi sebagai alat pemasaran produk
3. Setelah mengidentifikasi isu-isu strategi, maka melakukan evaluasi isu strategi, dari hasil pengevaluasian isu tersebut menghasilkan 2 kategori, kategori tersebut terdiri dari 4 strategis dan 2 moderat. Berikut ini hasilnya:
 - a. Kategori yang bersifat strategis
 1. Peningkatan peran serta para stakeholder (35)
 2. Peningkatkan kualitas SDM untuk mengetahui tentang teknologi sebagai alat pemasaran produk (31)
 3. Pengoptimalan anggaran dengan kerjasama pihak swasta (29)
 4. Peningkatan kuantitas SDM di dinas maupun di balai penyuluh pertanian (28)

- b. Kategori yang bersifat moderat
 1. Peningkatan koordinasi dengan pihak stakeholder untuk melakukan pelatihan dan pembinaan lebih baik (25)
 2. Adanya peran serta masyarakat untuk meningkatkan produk pertanian dengan hasil olahan yang menarik agar dapat dipasarkan melalui web atau blog (22)

B. Saran

1. Pengoptimalan anggaran yang ada agar semua rencana yang telah dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diinginkan, karena dengan anggaran yang mencukupi dapat memaksimalkan pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Banjarnegara dan dapat sesuai sasaran yang telah ditentukan.
2. Kurangnya SDM yang ada di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Banjarnegara membuat strategi yang telah dibuat tidak berjalan sesuai dengan rencana, dengan menambah pegawai penyuluh pertanian di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Banjarnegara dapat menjadikan lebih efektif dalam melaksanakan strategi

pemberdayaan masyarakat dalam pengolahan hasil pertanian di Kecamatan Banjarnegara.

3. Antusias masyarakat yang kurang menjadikan strategi tersebut tidak berjalan dengan lancar, dengan diberikan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat untuk menumbuhkan antusias masyarakat dalam mengolah hasil pertanian di Kecamatan Banjarnegara dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat membuka lapangan pekerjaan yang baru untuk menambah penghasilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri, 1995. "Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Lokal dalam Program IDT: Studi Kasus Tipologi Desa Hutan di Kabupaten Madiun". Dalam Mubyarto (ed.), Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: Aditya Media.
- Setiawan, Bakti, 2003, Pembangunan Masyarakat dan Perencanaan Partisipatif, Konsep Dasar dan Faktor-Faktor Kesuksesan, Makalah pada Pelatihan Participatory Planning, MPKD UGM Bekerjasama dengan Bali Urban Infrastructure Programme (BUIP).
- Kuncoro Mudrajad. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif ?* (Jakarta: penerbit Erlangga, 2006)

- Supranto.2004. *menyusun proposal penelitian, FEUI Pres.* Jakarta
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik.* Bandung : Alfabeta
- Dra. Risyanti Riza, Drs. H. Roesmidi, M.M. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat.* Sumedang : Alqaprint Jatinangor
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran.* Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS)
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonomi & Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: Citra Utama
- Umar, Husein. 2001. *Strategic Management In Action.* Jakarta: Rineka Cipta
- Ridwan. 2008. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.* Bandung: Alfabeta
- Madyana.2008. *Dasar Penentuan Sampel Dalam Metodologi Penelitian.* Yogyakarta : Universitas Admajaya
- Salusu. 2005. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit.* Jakarta : Grasindo
- Bryson, John M. 1999, *Perencanaan Strategis.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nawawi, H. Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan.* Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Wrihatnolo, Randy R. 2007. *Manajemen Pemberdayaan.* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Alwasilah, Chaedar. 2003. *Pokoknya Kualitatif, Dasar-dasar merancang dan melakukan penelitian kualitatif.* Jakarta: Kiblat Buku Utama.